



BOOKLET

**INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

2019



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



BOOKLET

**INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

2019

ISBN: 978-602-5407-52-9

No. Publikasi: 74520.2101

Katalog: 4601006.74

Ukuran Booklet: A5 (21 x 14,8 cm)

Jumlah Halaman: iv + 29

Naskah:

Bidang Sosial BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

Penyunting Gambar:

Bidang Sosial BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

Desain Kover:

Bidang Sosial BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

Ilustrasi:

Freepik, pikisuperstar, xnimrodx

Penerbit

©BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

Pencetak:

-

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Booklet Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara. Booklet ini berisi berbagai data dan informasi terpilih seputar aspek, variabel dan indikator IDI di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dianalisis secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami perkembangan demokrasi di Sulawesi Tenggara.

Materi yang disajikan dalam Booklet ini memuat hal-hal yang terkait dengan perkembangan aspek, variabel dan indikator IDI. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan demokrasi di Sulawesi Tenggara.

Kritik dan saran konstruktif berbagai pihak kami harapkan untuk penyempurnaan penerbitan mendatang. Semoga publikasi ini mampu memenuhi tuntutan kebutuhan data statistik, baik oleh instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi maupun masyarakat luas.

Kendari, Desember 2020
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Tenggara



Agnes Widiastuti



V
tpn
Dk
af
tar
wZ
Isi
dm
Cy

Kata Pengantar iii

Daftar Isi iv

Sekilas IDI 01

Perhitungan Indeks 09

Perkembangan Indeks .. 13

Ringkasan 28

01

Sekilas IDI

SEKILAS IDI

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia



Data yang dikumpulkan adalah kejadian/fakta lapangan.

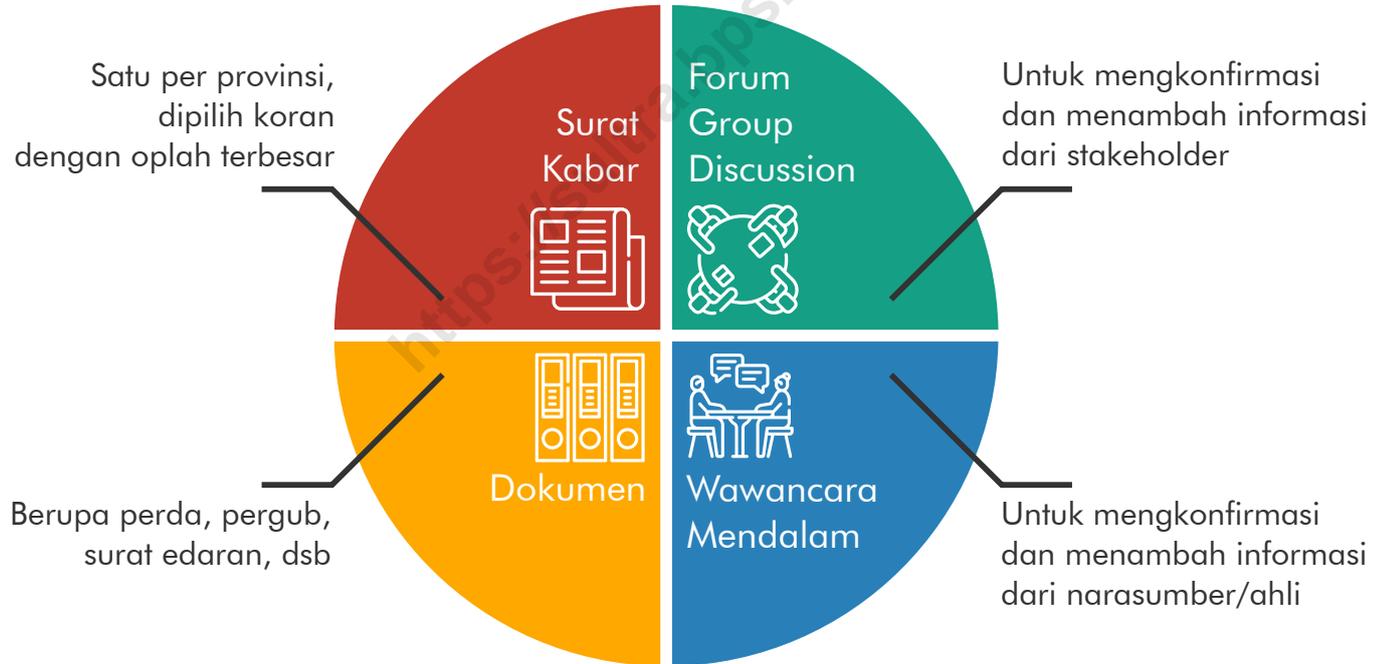


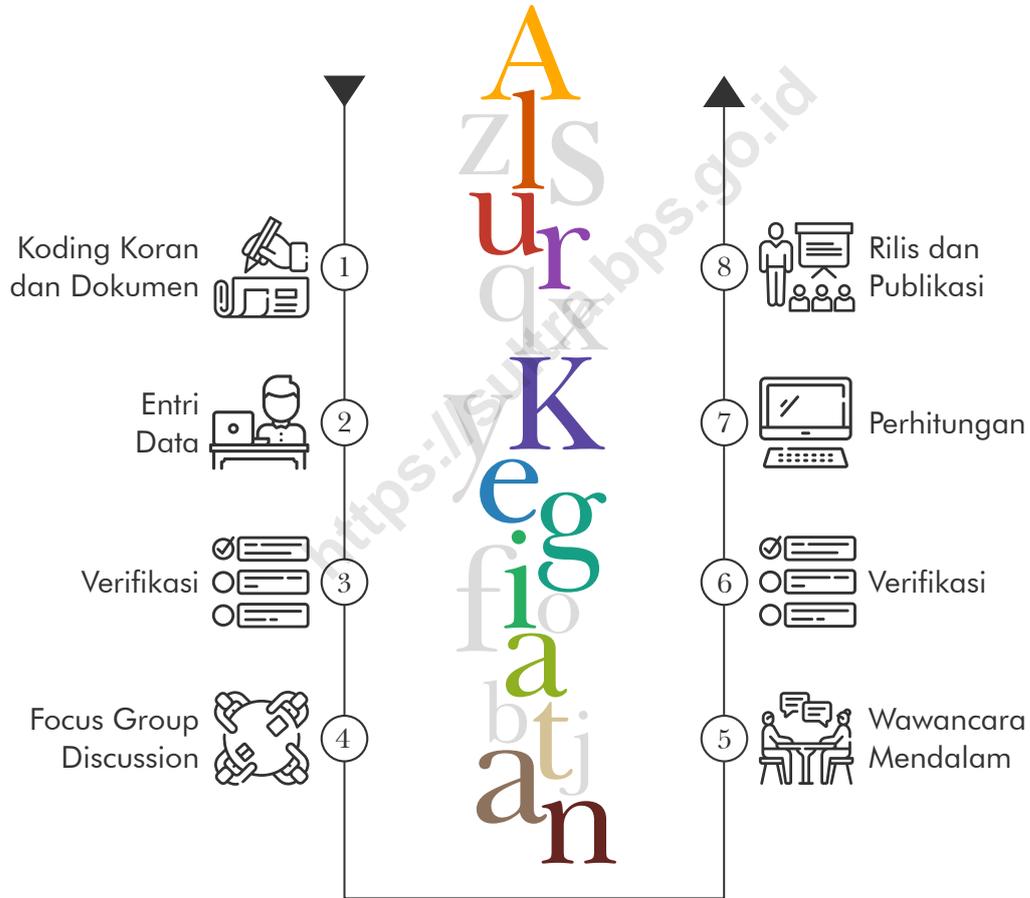
Pengumpulan data IDI dilakukan di 34 provinsi dan dicatat kejadian yang terjadi di provinsi bersangkutan.



Data yang dikumpulkan merupakan fakta yang terjadi antara 1 Januari hingga 31 Desember

SUMBER DATA





KOMPONEN DAN SUMBER DATA IDI

NO	ASPEK, VARIABEL, INDIKATOR	SUMBER DATA			
		SURAT KABAR	DOKUMEN	FGD	WM
ASPEK I. KEBEBASAN SIPIL					
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat					
1	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	√		√	√
2	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	√		√	√
Kebebasan Berpendapat					
3	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	√		√	√
4	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	√		√	√
Kebebasan Berkeyakinan					
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama		√	√	√
6	Tindakan/ Pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	√		√	√
7	Ancaman/penggunaan kekerasan dari kelompok masyarakat terkait ajaran agama	√		√	√
Kebebasan dari Diskriminasi					
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya		√	√	√
9	Tindakan/ Pernyataan pejabat pemerintah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya	√		√	√
10	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya	√		√	√

NO	ASPEK, VARIABEL, INDIKATOR	SUMBER DATA			
		SURAT KABAR	DOKUMEN	FGD	WM
ASPEK II HAK-HAK POLITIK					
Hak Memilih dan Dipilih					
11	Hak memilih atau dipilih terhambat		√		
12	Ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih		√		
13	Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)		√		
14	Partisipasi pemilih dalam Pemilu (<i>voters turnout</i>)		√		
15	Persentase perempuan terhadap total anggota DPRD Provinsi		√	√	
Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan					
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	√		√	√
17	Kritik/masukan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	√		√	
ASPEK III LEMBAGA DEMOKRASI					
Pemilu yang Bebas dan Adil					
18	Netralitas penyelenggara pemilu		√		
19	Kecurangan dalam penghitungan suara		√		
Peran DPRD					
20	Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan		√	√	
21	Perda yang merupakan inisiatif DPRD		√	√	
22	Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif		√	√	
Peran Partai Politik					
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai politik peserta pemilu	√	√	√	
24	Persentase perempuan pengurus partai politik		√	√	
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah					
25	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN		√	√	
26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh Pemerintah Daerah		√	√	
Peran Peradilan yang Independen					
27	Keputusan hakim yang kontroversial	√		√	√
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	√		√	√

"Metode pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia saat ini masih merupakan rata-rata tertimbang dari Indeks demokrasi provinsi.

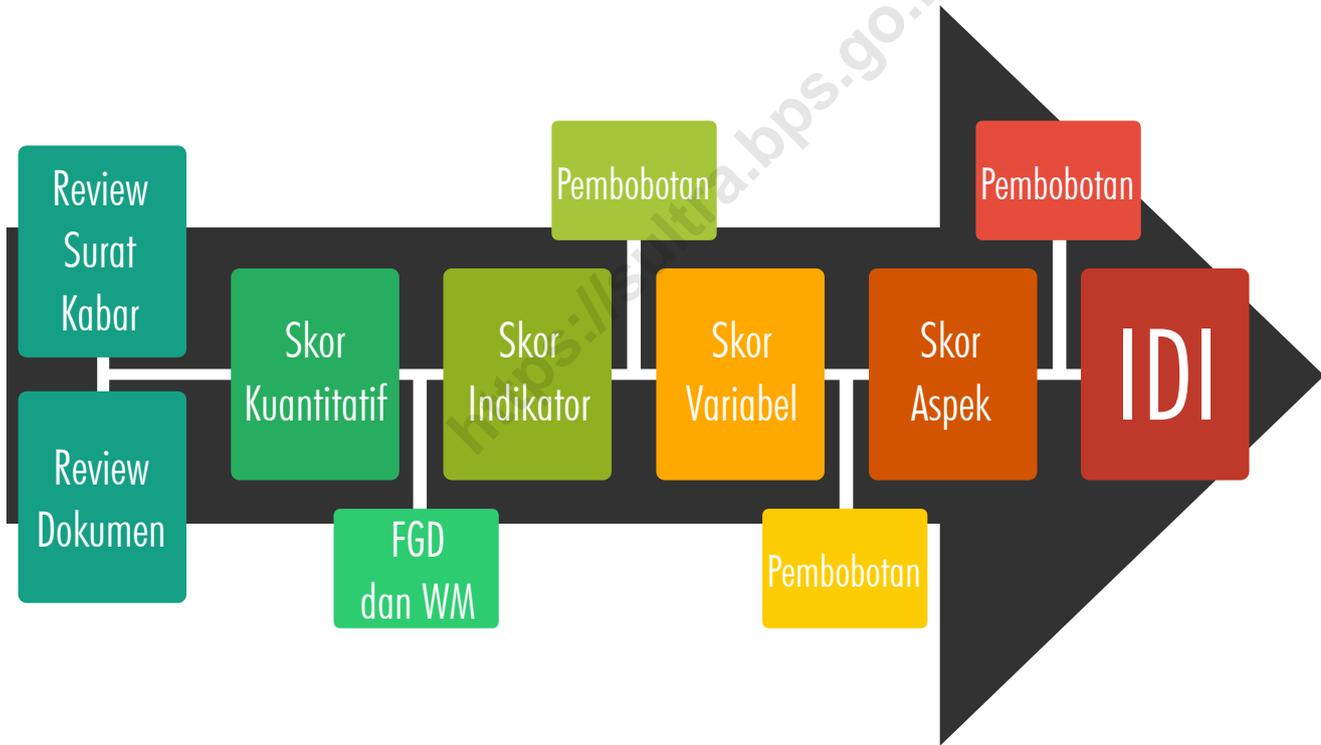
Ke depan, pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia harus mempertimbangkan fakta yang berlaku pada pemerintah pusat sebagai sumber data."

"...halaman ini sengaja dikosongkan..."

<http://sultra.bps.go.id>
02

PERHITUNGAN INDEKS

ALUR PERHITUNGAN



NILAI MINIMAL, MAKSIMAL, DAN PENIMBANG

NO	ASPEK, VARIABEL, INDIKATOR	MIN	MAX	AHP
ASPEK I. KEBEBASAN SIPIL				0,327
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat				0,084
1	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	2	0	0,875
2	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	4	0	0,125
Kebebasan Berpendapat				0,093
3	Ancaman/penggunaankekerasanolehaparapemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	6	0	0,833
4	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	2	0	0,167
Kebebasan Berkeyakinan				0,584
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	23	0	0,708
6	Tindakan/pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	8	0	0,113
7	Ancaman/penggunaan kekerasan dari kelompok masyarakat terkait ajaran agama	5	0	0,179
Kebebasan dari Diskriminasi				0,239
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya	6	0	0,392
9	Tindakan/pernyataan pejabat pemerintah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya	8	0	0,278
10	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya	3	0	0,333
ASPEK II HAK-HAK POLITIK				0,413
Hak Memilih dan Dipilih				0,5
11	Hak memilih atau dipilih terhambat	156	0	0,176
12	Ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih	100	0	0,077
13	Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)	0%	100%	0,496
14	Partisipasi pemilih dalam Pemilu (<i>voters turnout</i>)	0%	100%	0,155
15	Persentase perempuan terhadap total anggota DPRD Provinsi	0%	30%	0,096

NO	ASPEK, VARIABEL, INDIKATOR	MIN	MAX	AHP
Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan				0,5
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	23	0	0,500
17	Kritik/masukan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	0	545	0,500
ASPEK III LEMBAGA DEMOKRASI				0,26
Pemilu yang Bebas dan Adil				0,152
18	Netralitas penyelenggara pemilu	22	0	0,500
19	Kecurangan dalam penghitungan suara	79	0	0,500
Peran DPRD				0,197
20	Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan	0 %	20 % 10 %	0,659
21	Perda yang merupakan inisiatif DPRD	0	50%	0,156
22	Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif	0	28	0,185
Peran Partai Politik				0,197
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai politik peserta pemilu	0	7	0,900
24	Persentase perempuan pengurus partai politik	0%	30%	0,100
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah				0,227
25	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	38	0	0,457
26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh Pemerintah Daerah	0%	100%	0,543
Peran Peradilan yang Independen				0,227
27	Keputusan hakim yang kontroversial	4	0	0,500
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	1	0	0,500

<http://sultra.bps.go.id>
03

PERKEMBANGAN INDEKS

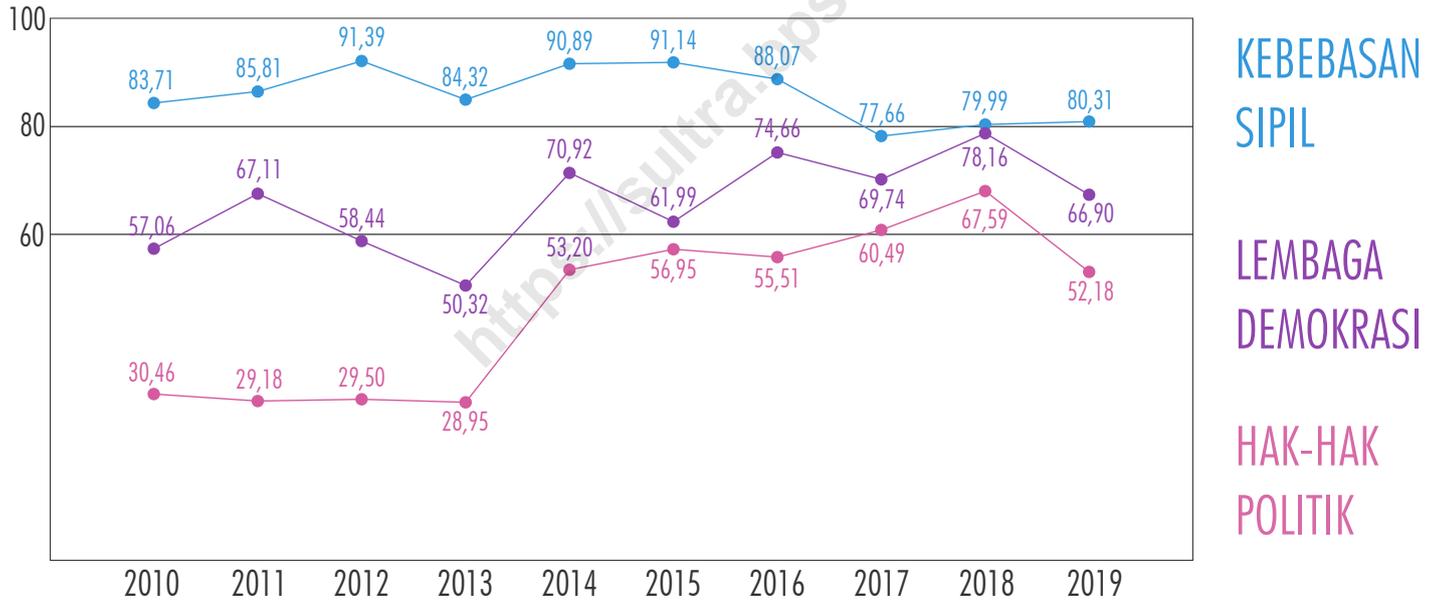
PERKEMBANGAN IDI DI SULAWESI TENGGARA



Indeks Demokrasi Indonesia
Provinsi Sulawesi Tenggara
pada tahun 2019 mencapai 65,45,
dimana skor ini **turun** sebanyak
8,87 poin dari tahun 2018

Meskipun demikian, skor ini masih dalam
kategori **sedang** (antara 60-80 poin).
Skor ini masih relatif lebih tinggi
dari tahun 2010-2013
yang tergolong buruk.

PERKEMBANGAN ASPEK IDI DI SULAWESI TENGGARA





Aspek kebebasan sipil memiliki skor yang meningkat sebesar 0,54 poin. Peningkatan tersebut sebenarnya masih lebih rendah dari tahun 2010-2016, namun masih dalam kategori baik.



Aspek lembaga demokrasi memiliki skor yang menurun sebanyak 11,26 poin. Selama 2010-2019 skor aspek ini fluktuatif, utamanya dari 2014-2019 namun skor pada tahun-tahun tersebut masih dalam kategori sedang.



Aspek hak-hak politik memiliki skor yang berkurang sebanyak 14,8 poin. Penurunan ini merupakan penurunan yang paling signifikan dari 9 tahun terakhir. Oleh karena itu, dimensi ini kedepannya perlu diperhatikan lebih baik lagi.

PERKEMBANGAN INDEKS VARIABEL IDI SULTRA TAHUN 2018–2019

		2018	2019	
	I. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	100,00	100,00	-
	II. Kebebasan Berpendapat	34,05	41,68	▲ 7,63
	III. Kebebasan Berkeyakinan	78,71	75,57	▼ 3,14
	IV. Kebebasan dari Diskriminasi	93,05	100,00	▲ 6,95
	V. Hak Memilih dan Dipilih	77,09	78,47	▲ 1,38
	VI. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	58,09	25,89	▼ 32,2
	VII. Pemilu yang Bebas dan Adil	100,00	84,58	▼ 15,42
	VIII. Peran DPRD	67,67	64,38	▼ 3,29
	IX. Peran Partai Politik	87,14	100,00	▲ 12,86
	X. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	43,01	45,41	▲ 2,4
	XI. Peran Peradilan yang Independen	100,00	50,00	▼ 50



Terjadi peningkatan skor indeks pada 5 variabel, yaitu variabel II, IV, V, IX, X. Peningkatan tinggi terjadi pada variabel peran partai politik, yang skornya menjadi 100. Sedangkan untuk peningkatan variabel lain, peningkatan tidak terlalu tinggi.

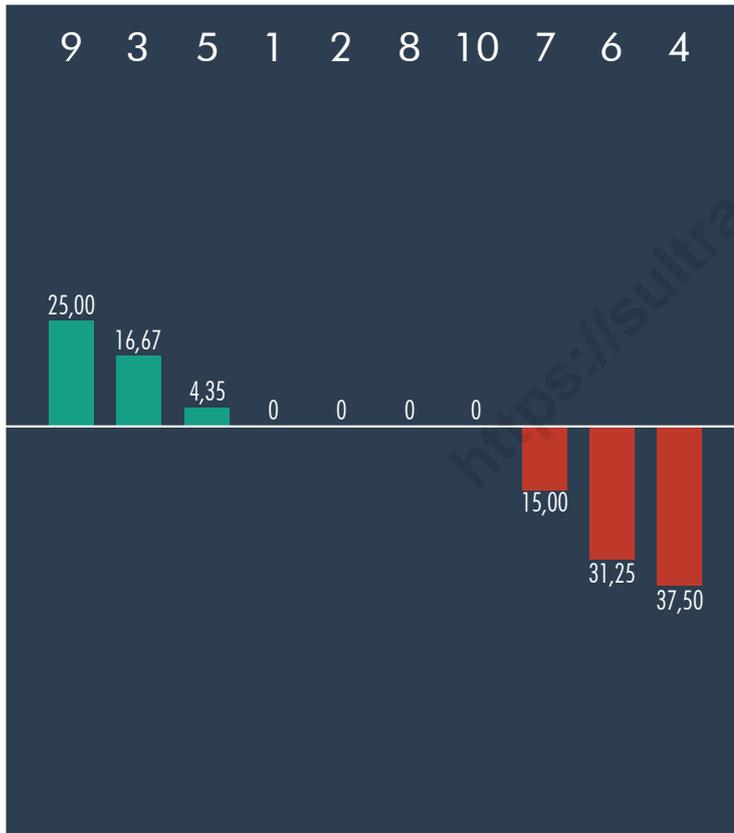


Terjadi penurunan skor indeks pada 5 variabel, yaitu variabel III, VI, VIII, VIII, XI. Peningkatan drastis terjadi pada variabel VI dan XI. yaitu hingga 32,2 dan 50 poin. Sedangkan untuk penurunan variabel lain, tidak terlalu tinggi.



Tidak terjadi perubahan pada 1 variabel, yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat. Meskipun demikian, skor variabel ini merupakan skor maksimum (100)

PERKEMBANGAN INDIKATOR KEBEBASAN SIPIL 2018-2019



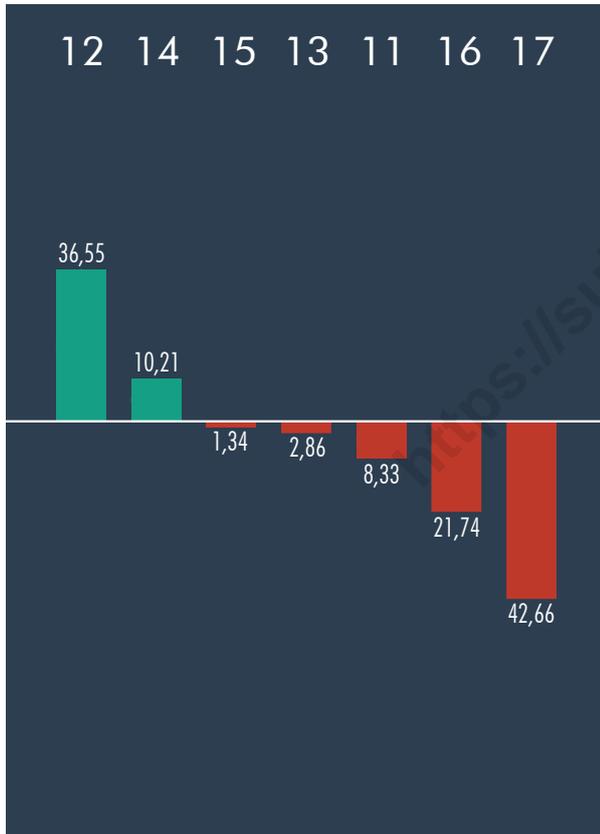
9. Tindakan/ pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok
3. Ancaman/ penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat
5. Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama
1. Ancaman/ penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
2. Ancaman/ penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
8. Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok
10. Ancaman/ penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, kelompok
7. Ancaman/ penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama
6. Tindakan/ pernyataan pejabat yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama
4. Ancaman / penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat

“

Terdapat 3 indikator yang meningkat, 3 indikator yang menurun, serta 4 indikator yang tetap. Peningkatan tertinggi pada indikator tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok (25,00 poin) sedangkan penurunan tertinggi pada indikator Ancaman /penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat (turun 37,50 poin).

”

PERKEMBANGAN INDIKATOR HAK-HAK POLITIK 2018-2019



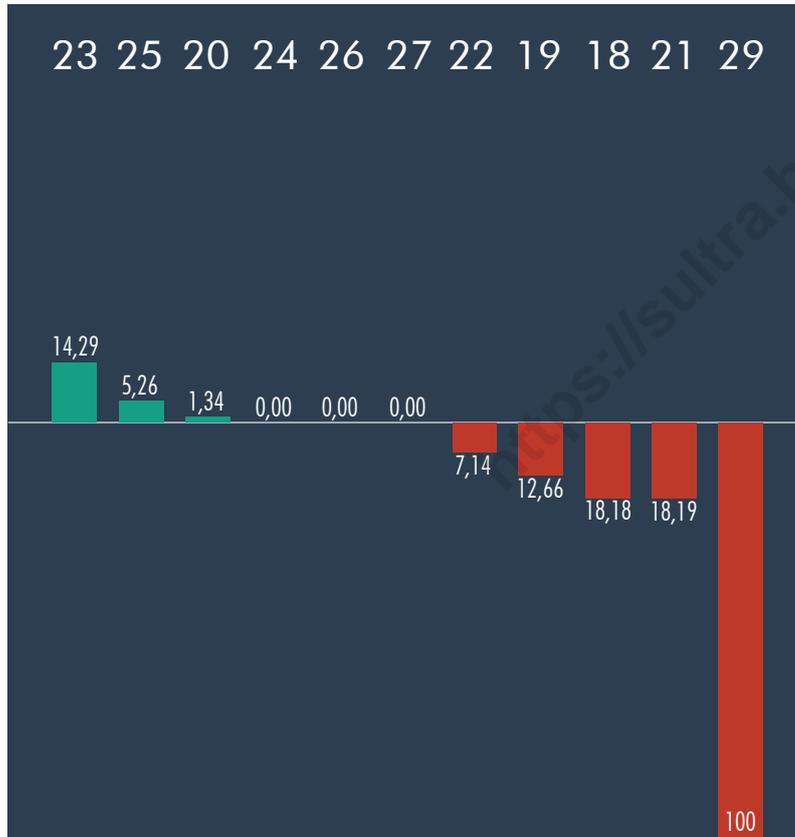
- 12. Ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih
- 14. Voters turnout
- 15. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi
- 13. Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- 11. Hak memilih atau dipilih terhambat
- 16. Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan
- 17. Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan



Terdapat 2 indikator yang meningkat, 5 indikator yang menurun, serta tidak ada indikator yang tetap. Peningkatan tertinggi pada indikator ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih(36,55 poin) sedangkan penurunan tertinggi pada indikator pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan (turun 42,66 poin).



PERKEMBANGAN INDIKATOR LEMBAGA DEMOKRASI 2018-2019



- 23. Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu
- 25. Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN
- 20. Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan
- 24. Persentase perempuan pengurus partai politik
- 26. Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah
- 27. Keputusan hakim yang kontroversial
- 22. Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah
- 19. Keputusan hakim yang kontroversial
- 18. Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi
- 21. Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN
- 28. Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi

“

Terdapat 3 indikator yang meningkat, 5 indikator yang menurun, serta 3 indikator yang tetap. Peningkatan tertinggi pada indikator kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai pemilu (14,29 poin) sementara indikator pengehentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi (turun 100 poin)

”

MASIH TERDAPAT

8

INDIKATOR BERKATEGORI BURUK

03

37,50

Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat

06

43,75

Tindakan/pernyataan pejabat yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama

15

59,27

Persentase perempuan terpilih terhadap total anggaran DPRD Provinsi

16

18,48

Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan

17

33,30

Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintah

22

3,57

Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif

26

8,33

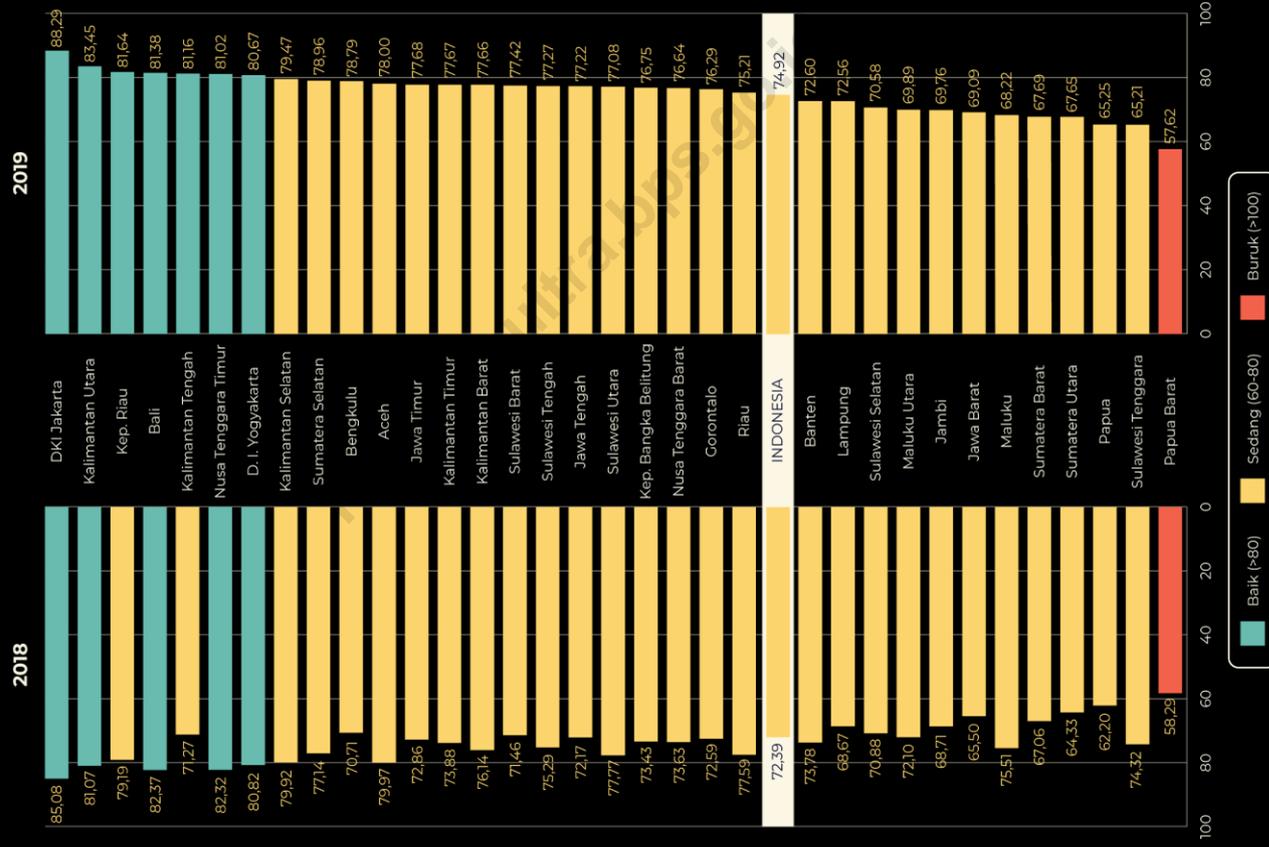
Persentase perempuan terpilih terhadap total anggaran DPRD Provinsi

28

0,00

Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi

PERKEMBANGAN IDI PROVINSI 2018-2019



04

KESIMPULAN

1. Angka IDI Sultra 2019 sebesar 65,21 turun sebesar 9,11 poin dibandingkan tahun 2018.
2. Penurunan angka IDI Sultra 2019 didorong oleh penurunan aspek hak-hak politik (14,8 poin) dan aspek lembaga demokrasi (11,26 poin).
3. Aspek hak-hak politik pada IDI Sultra 2019 masuk dalam kategori buruk (nilai indeks < 60) sedangkan aspek kebebasan sipil masuk dalam kategori baik (nilai indeks > 80) dan lembaga demokrasi masuk dalam kategori sedang (nilai indeks $60 - 80$).
4. Peningkatan aspek kebebasan sipil disebabkan oleh peningkatan variabel kebebasan berpendapat dan berserikat dan kebebasan dari diskriminasi.
5. Penurunan aspek hak-hak politik terutama karena menurunnya indikator kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat, kualitas daftar pemilih tetap (DPT) dan persentase anggota perempuan DPRD Provinsi.
6. Penurunan aspek lembaga demokrasi terjadi karena menurunnya variabel pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, dan peran peradilan yang independen (terdapat satu kasus SP3 pada tahun 2019)

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**
Jl. Boulevard No. 1 Kecamatan Kambu Kendari 93231
Telp. (0401) 3121751 – 3135363 Fax. (0401)3122355
Email : bps7400@bps.go.id Homepage : <http://sultra.bps.go.id>

ISBN 978-602-5407-52-9 (PDF)

